



# **GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

## **PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

**NOMOR 061 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 060 TAHUN 2022 TENTANG DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Kalimantan Selatan perlu dilakukan penyesuaian terhadap regulasi dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 060 Tahun 2022 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2022 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat berat Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 625);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 129);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 060 TAHUN 2022 TENTANG DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2022.**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 060 Tahun 2022 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 60) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
6. Badan Pendapatan Daerah adalah badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah.
8. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
9. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.
10. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
11. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
12. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau fungsi dan/atau penggunaannya.
13. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor.

4. merek dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/atau Tahun Pembuatan dan negara produsen sama.
- (3) Dalam Hal NJKB untuk jenis, merek, dan tipe Kendaraan Bermotor tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini tetapi masih terdapat jenis, merek, dan tipe yang sama dengan Tahun Pembuatan yang berbeda, NJKB sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditentukan sebagai berikut:
- a. untuk Tahun Pembuatan baru, penentuan NJKB berdasarkan:
    1. HPU;
    2. NJKB dari Daerah Provinsi lain;
    3. kenaikan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya dan paling banyak kenaikan 5 (lima) tingkat;
    4. harga yang tercantum dalam faktur; atau
    5. merek dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/atau Tahun Pembuatan dan negara produsen sama.
  - b. untuk Tahun Pembuatan lebih tua, penentuan NJKB berdasarkan:
    1. HPU;
    2. NJKB dari daerah provinsi lain;
    3. dengan penurunan untuk roda 4 (empat) paling banyak Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya;
    4. dengan penurunan untuk roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) paling banyak Rp100.000 (seratus ribu rupiah) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya; atau
    5. merek dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/atau Tahun Pembuatan dan negara produsen sama.
- (4) Penentuan NJKB sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diusulkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah kepada Kepala Badan, dengan melampirkan faktur dan keterangan/bukti lainnya.
3. Ketentuan dalam Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

- (1) Permohonan penetapan NJKB baru atau nilai jual yang belum diatur dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini diajukan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Badan.
- (2) Dalam hal terdapat Kendaraan Bermotor dengan jenis, merek, tipe dan nilai jual Tahun Pembuatan baru atau nilai jual yang belum diatur dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menetapkan sementara besaran NJKB tersebut.

4. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 060 Tahun 2022 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 60) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru

Pada tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR  
KALIMANTAN SELATAN NOMOR 060 TAHUN 2022  
TENTANG DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN

JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN NILAI JUAL UBAH BENTUK KENDARAAN BERMOTOR

A. JENIS KENDARAAN BERMOTOR

1. JENIS : MOBIL PENUMPANG - SEDAN

NO	KODING	MEREX	TYPE	TH BUAT	NKB	BOBOT	DP PER
1	2	3	4	5	6	7	8
1	101009 00130	ALFA ROMEO	1500ER 2000cc	2001	148,000,000	1.025	149,650,000
2	101009 00130	ALFA ROMEO	1500ER 2000cc	2002	150,000,000	1.025	153,750,000
3	101009 00130	ALFA ROMEO	1500ER 2000cc	2003	154,000,000	1.025	157,650,000
4	101009 00130	ALFA ROMEO	1500ER 2000cc	2004	170,000,000	1.025	174,250,000
5	101009 00230	ALFA ROMEO	1500CAV6 2.4 V	2000	147,000,000	1.025	150,675,000
6	101009 00330	ALFA ROMEO	166 3.0 L	2001	209,000,000	1.025	214,225,000
7	101009 00330	ALFA ROMEO	166 3.0 L	2002	215,000,000	1.025	220,375,000
8	101009 00330	ALFA ROMEO	166 3.0 L	2003	221,000,000	1.025	226,525,000
9	101009 00330	ALFA ROMEO	166 3.0 L	2004	242,000,000	1.025	248,050,000
10	101009 00430	ALFA ROMEO	A166 2.0 SPARK SALES/SPEED	2000	138,000,000	1.025	141,450,000
11	101009 00430	ALFA ROMEO	A166 2.0 SPARK SALES/SPEED	2001	139,000,000	1.025	142,475,000
12	101009 00430	ALFA ROMEO	A166 2.0 SPARK SALES/SPEED	2002	142,000,000	1.025	146,550,000
13	101009 00430	ALFA ROMEO	A166 2.0 SPARK SALES/SPEED	2003	146,000,000	1.025	149,650,000
14	101009 00430	ALFA ROMEO	A166 2.0 SPARK SALES/SPEED	2004	181,000,000	1.025	186,025,000
15	101009 00430	ALFA ROMEO	A166 2.0 SPARK SALES/SPEED	2006	196,000,000	1.025	202,950,000
16	101009 00430	ALFA ROMEO	A166 2.0 SPARK SALES/SPEED	2008	224,000,000	1.025	229,600,000
17	101009 00430	ALFA ROMEO	A166 2.0 SPARK SALES/SPEED	2007	248,000,000	1.025	254,200,000
18	101009 00630	ALFA ROMEO	A166 2.5 0-SYSTEM	2006	215,000,000	1.025	220,375,000
19	101009 00630	ALFA ROMEO	A166 2.5L	2003	158,000,000	1.025	161,950,000
20	101009 00630	ALFA ROMEO	A166 2.5L	2004	175,000,000	1.025	179,375,000
21	101009 00730	ALFA ROMEO	A166 3.0 SPORTRONIC V6	2002	158,000,000	1.025	161,950,000
22	101009 00730	ALFA ROMEO	A166 3.0 SPORTRONIC V6	2003	175,000,000	1.025	179,375,000
23	101009 00730	ALFA ROMEO	A166 3.0 SPORTRONIC V6	2004	204,000,000	1.025	209,100,000
24	101009 00730	ALFA ROMEO	A166 3.0 SPORTRONIC V6	2005	253,000,000	1.025	259,325,000
25	101009 00730	ALFA ROMEO	A166 3.0 SPORTRONIC V6	2006	280,000,000	1.025	287,000,000
26	101009 00730	ALFA ROMEO	A166 3.0 SPORTRONIC V6	2007	332,000,000	1.025	340,300,000
27	101009 00930	ALFA ROMEO	SPORT TRONIK 3000cc	2000	133,000,000	1.025	136,325,000
28	101009 00930	ALFA ROMEO	SPORT TRONIK 3000cc	2001	141,000,000	1.025	144,525,000
29	101009 00930	ALFA ROMEO	SPORT TRONIK 3000cc	2002	158,000,000	1.025	161,950,000
30	101009 00930	ALFA ROMEO	SPORT TRONIK 3000cc	2003	175,000,000	1.025	179,375,000
31	101009 00930	ALFA ROMEO	SPORT TRONIK 3000cc	2004	204,000,000	1.025	209,100,000
32	101009 00930	ALFA ROMEO	SPORT TRONIK 3000cc	2005	253,000,000	1.025	259,325,000
33	101009 00930	ALFA ROMEO	SPORT TRONIK 3000cc	2006	280,000,000	1.025	287,000,000
34	101009 00930	ALFA ROMEO	SPORT TRONIK 3000cc	2007	332,000,000	1.025	340,300,000
35	101027 01515	ASTON MARTIN	DB 11	2020	8,817,000,000	1.025	9,057,425,000
36	101027 01515	ASTON MARTIN	DB 11	2021	7,499,000,000	1.025	7,686,475,000
37	101027 00815	ASTON MARTIN	DB 11 AT	2018	5,144,000,000	1.025	5,272,600,000
38	101027 00015	ASTON MARTIN	DB 11 AT	2019	5,145,000,000	1.025	5,273,625,000
39	101027 01715	ASTON MARTIN	DB 11 AT	2021	5,147,000,000	1.025	5,275,675,000
40	101027 00915	ASTON MARTIN	DB 11 V8 AT	2018	4,599,000,000	1.025	4,713,975,000
41	101027 00915	ASTON MARTIN	DB 11 V8 AT	2019	4,600,000,000	1.025	4,715,000,000
42	101027 00915	ASTON MARTIN	DB 11 V8 AT	2020	4,612,000,000	1.025	4,727,300,000
43	101027 00915	ASTON MARTIN	DB 11 V8 AT	2021	5,073,000,000	1.025	5,199,825,000
44	101024 00115	ASTON MARTIN	DB7 VANTAGE	2002	1,106,000,000	1.025	1,133,650,000
45	101024 00115	ASTON MARTIN	DB7 VANTAGE	2003	1,186,000,000	1.025	1,215,650,000
46	101024 00415	ASTON MARTIN	DB9	2007	1,875,000,000	1.025	1,921,675,000
47	101024 00215	ASTON MARTIN	DB9 VOLANTE MT	2006	1,019,000,000	1.025	1,044,475,000
48	101027 01115	ASTON MARTIN	DBS	2018	3,149,000,000	1.025	3,227,725,000
49	101027 01115	ASTON MARTIN	DBS	2019	3,150,000,000	1.025	3,228,750,000
50	101029 00515	ASTON MARTIN	DBS 4X2 AT	2018	3,129,000,000	1.025	3,203,125,000
51	101027 01615	ASTON MARTIN	DBS AT	2020	3,156,000,000	1.025	3,238,950,000
52	101027 01615	ASTON MARTIN	DBS AT	2021	3,474,000,000	1.025	3,560,850,000
53	101027 01215	ASTON MARTIN	DBX	2018	1,890,000,000	1.025	1,937,250,000
54	101027 01015	ASTON MARTIN	VANQUISH 6.0 AT	2018	6,113,000,000	1.025	6,316,825,000
55	101027 01015	ASTON MARTIN	VANQUISH 6.0 AT	2019	6,114,000,000	1.025	6,318,650,000
56	101027 01015	ASTON MARTIN	VANQUISH 6.0 AT	2020	6,134,000,000	1.025	6,337,350,000
57	101027 01015	ASTON MARTIN	VANQUISH 6.0 AT	2021	6,947,000,000	1.025	7,170,675,000
58	101024 00315	ASTON MARTIN	VANQUISH V12	2006	2,284,000,000	1.025	2,320,900,000
59	101026 00615	ASTON MARTIN	VANTAGE	2010	2,143,000,000	1.025	2,196,575,000
60	101027 01315	ASTON MARTIN	VANTAGE	2018	2,150,000,000	1.025	2,203,750,000
61	101027 01315	ASTON MARTIN	VANTAGE	2019	2,151,000,000	1.025	2,204,775,000
62	101027 01315	ASTON MARTIN	VANTAGE	2020	2,156,000,000	1.025	2,209,900,000
63	101027 01315	ASTON MARTIN	VANTAGE	2021	2,372,000,000	1.025	2,431,300,000
64	101027 00715	ASTON MARTIN	VIRAGE	2011	3,129,000,000	1.025	3,207,225,000
65	101027 00132	AUDI	A2 1800cc	2000	96,000,000	1.025	98,400,000
66	101027 00232	AUDI	A3 1.6 AT	2006	150,000,000	1.025	153,750,000
67	101027 00232	AUDI	A3 1.6 AT	2008	186,000,000	1.025	190,150,000
68	101027 00232	AUDI	A3 1.6 AT	2007	185,000,000	1.025	189,625,000
69	101027 00332	AUDI	A3 1.6 MT	2004	122,000,000	1.025	125,050,000
70	101027 00332	AUDI	A3 1.6 MT	2006	140,000,000	1.025	143,500,000
71	101027 00332	AUDI	A3 1.6 MT	2008	153,000,000	1.025	156,825,000
72	101027 00432	AUDI	A3 1.8 AT	2001	126,000,000	1.025	129,150,000
73	101027 00432	AUDI	A3 1.8 AT	2002	134,000,000	1.025	137,350,000
74	101027 00432	AUDI	A3 1.8 AT	2003	146,000,000	1.025	151,700,000
75	101027 00432	AUDI	A3 1.8 AT	2004	160,000,000	1.025	164,000,000
76	101027 00632	AUDI	A3 1.8 TURBO AT	2002	113,000,000	1.025	115,825,000

B. NILAI JUAL URAH BENTUK KENDARAAN BERMOTOR

NO	URAH BENTUK	TAHUN	JENIS DASAR							
			PICK UP	BLINDWAR	DOUBLE CABIN	MICROBUS	LIGHT TRUCK	TRUCK	TROTON	TRACTOR HEAD
360	TANRI	2013	29,000,000	-	-	-	35,000,000	49,000,000	-	-
361	TANRI	2014	30,000,000	-	-	-	36,000,000	50,000,000	-	-
362	TANRI	2015	48,000,000	-	-	-	64,000,000	74,000,000	-	-
363	TANRI	2016	47,000,000	-	-	-	65,000,000	76,000,000	-	-
364	TANRI	2017	48,000,000	-	-	-	65,000,000	76,000,000	-	-
365	TANRI	2018	48,000,000	-	-	-	67,000,000	77,000,000	-	-
366	TANRI	2019	50,000,000	-	-	-	65,000,000	78,000,000	-	-
367	TANRI	2020	59,000,000	-	-	-	69,000,000	79,000,000	84,000,000	89,000,000
368	TANRI	2021	60,000,000	-	-	-	70,000,000	80,000,000	85,000,000	90,000,000
369	TANRI	2022	60,000,000	-	-	-	75,000,000	85,000,000	85,000,000	95,000,000
370	TRACTOR HEAD	< 2001-2003	-	-	-	-	-	30,000,000	-	-
371	TRACTOR HEAD	2004	-	-	-	-	-	35,000,000	-	-
372	TRACTOR HEAD	2005	-	-	-	-	-	40,000,000	-	-
373	TRACTOR HEAD	2006	-	-	-	-	-	45,000,000	-	-
374	TRACTOR HEAD	2007	-	-	-	-	-	50,000,000	-	-
375	TRACTOR HEAD	2008	-	-	-	-	-	55,000,000	-	-
376	TRACTOR HEAD	2009	-	-	-	-	-	60,000,000	-	-
377	TRACTOR HEAD	2010	-	-	-	-	-	65,000,000	-	-
378	TRACTOR HEAD	2011	-	-	-	-	-	70,000,000	-	-
379	TRACTOR HEAD	2012	-	-	-	-	-	71,000,000	-	-
380	TRACTOR HEAD	2013	-	-	-	-	-	72,000,000	-	-
381	TRACTOR HEAD	2014	-	-	-	-	-	73,000,000	-	-
382	TRACTOR HEAD	2015	-	-	-	-	-	74,000,000	-	-
383	TRACTOR HEAD	2016	-	-	-	-	-	75,000,000	-	-
384	TRACTOR HEAD	2017	-	-	-	-	-	76,000,000	-	-
385	TRACTOR HEAD	2018	-	-	-	-	-	77,000,000	-	-
386	TRACTOR HEAD	2019	-	-	-	-	-	78,000,000	-	-
387	TRACTOR HEAD	2020	-	-	-	-	-	79,000,000	84,000,000	-
388	TRACTOR HEAD	2021	-	-	-	-	-	80,000,000	85,000,000	-
389	TRACTOR HEAD	2022	-	-	-	-	-	85,000,000	85,000,000	-
390	TRAILER	2020	-	-	-	-	-	79,000,000	84,000,000	89,000,000
391	TRAILER	2021	-	-	-	-	-	80,000,000	85,000,000	90,000,000
392	TRAILER	2022	-	-	-	-	-	85,000,000	85,000,000	90,000,000
393	VACUM	2020	49,000,000	-	-	-	59,000,000	69,000,000	74,000,000	-
394	VACUM	2021	50,000,000	-	-	-	60,000,000	70,000,000	75,000,000	-
395	VACUM	2022	50,000,000	-	-	-	60,000,000	70,000,000	75,000,000	-
396	WING BOX	2020	34,000,000	34,000,000	-	-	44,000,000	54,000,000	59,000,000	-
397	WING BOX	2021	35,000,000	35,000,000	-	-	45,000,000	55,000,000	60,000,000	-
398	WING BOX	2022	35,000,000	35,000,000	-	-	45,000,000	55,000,000	60,000,000	-

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR